

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Setiap manusia terlahir dalam keadaan yang berbeda-beda. Namun, setiap manusia memiliki hak dan kedudukan yang sama. Setiap manusia menuntut agar haknya terpenuhi tanpa memikirkan hak manusia lain. Padahal tertera jelas pada butir pengamalan Pancasila sila ke-2 yang berbunyi “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” bahwa setiap manusia mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan satu sama lain.

Permasalahan akan hak dan kedudukan merupakan hal yang penting. Perlu adanya pemahaman khusus supaya setiap manusia dapat menghormati hak setiap orang. Di sinilah pentingnya peran pemerintah untuk turut andil dalam pemenuhan hak, salah satunya dengan menyediakan fasilitas umum. Fasilitas umum merupakan sarana yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk beraktifitas. Mengacu pada dokumen Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 30/PRT/M/2006 mengenai definisi fasilitas tertulis bahwa “Fasilitas adalah semua atau sebagian dari kelengkapan prasarana dan sarana pada bangunan gedung dan lingkungannya agar dapat diakses dan dimanfaatkan oleh semua orang termasuk penyandang cacat dan lansia”.

Penyediaan fasilitas umum kerap menjadi permasalahan. Salah satu permasalahannya yaitu penyediaan fasilitas yang tidak memenuhi standar konsep aksesibilitas. (Khoirunisa & Aries Himawanto, 2018) mendefinisikan aksesibilitas adalah salah satu komponen penting dalam pembangunan demi terwujudnya keadilan bersama, terutama bagi para penyandang difabel dan orang tua. Definisi lain menjabarkan bahwa “Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi semua orang termasuk penyandang cacat dan lansia guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan” (Menteri Pekerjaan Umum, 2006).

Terdapat berbagai macam fasilitas umum. Salah satu fasilitas umum yang banyak dijumpai yaitu jalur pedestrian. (Mauliani, 2010) mengemukakan bahwa “Jalur pedestrian merupakan salah satu kelengkapan sebuah kota, yang

keberadaannya sangat dibutuhkan oleh warga kota yang bersangkutan untuk dapat bergerak dengan mudah, aman, dan nyaman dari suatu tempat ke tempat lainnya”. Jalur pedestrian sebaiknya dapat digunakan oleh berbagai kalangan. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan kondisi sebaliknya, kebermanfaatan jalur pedestrian kebanyakan hanya dapat dinikmati oleh orang normal saja, padahal terdapat para difabel yang seharusnya juga dapat memanfaatkan fasilitas tersebut. “Menjadi difabel ditengah masyarakat yang menganut paham ‘normalisme’, dimana semua sarana umum yang ada didesain khusus untuk ‘orang normal’ tanpa adanya fasilitas bagi difabel adalah sangat sulit” (Rahayu, dkk., 2013).

Difabel merupakan sebutan bagi para penyandang disabilitas. (Utami, dkk., 2018) mendefinisikan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara layaknya. Menurut *Convention On The Right of Person With Disabilities* yang telah disahkan dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2011 (dalam Lorenza, 2020), penyandang disabilitas termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Berdasarkan data berjalan 2020 dari Biro Pusat Statistik (dikutip dari surat kabar elektronik (Suara.com) jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,5 juta jiwa. Angka tersebut tergolong kecil jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 yang berjumlah 270,20 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2021). Meskipun demikian, selayaknya dalam penyediaan fasilitas umum tidak mengacu pada besar atau kecilnya pengguna layanan terutama dalam hal aksesibilitas.

Permasalahan mengenai tersedianya fasilitas umum yang ramah difabel kerap dipandang sebelah mata salah satunya di jalur pedestrian Malioboro Yogyakarta. Malioboro merupakan ikon dari Kota Yogyakarta. Lokasi Malioboro sangat strategis dan banyak dikunjungi para wisatawan,

baik dari mancanegara maupun lokal. Jalur Pedestrian Malioboro juga sudah dilengkapi beberapa fasilitas umum berupa lampu penerangan, kursi taman, halte, *zebra cross* dan jalur *guiding block*. Namun, fasilitas umum itu hanya dapat dinikmati oleh sebagian besar masyarakat normal saja, tidak untuk difabel.

Sebenarnya fasilitas umum ramah difabel di jalur pedestrian Malioboro sudah tersedia, salah satunya yaitu jalur *guiding block* yang ditujukan untuk para tunanetra. Akan tetapi, keberadaan jalur *guiding block* di jalur pedestrian Malioboro dinilai tidak berfungsi maksimal dan terjadinya alih fungsi penggunaan. Menurut Koordinator Forum Pemantau Independen (Forpi) Pemerintah Kota Yogyakarta FX Harry Cahya (dalam surat kabar elektronik (Antara Yogya) mengemukakan bahwa “keberadaan *guiding block* sangat penting untuk membantu penyandang disabilitas, khususnya tunanetra sehingga bisa berjalan dengan aman. Namun, banyak yang tidak berfungsi maksimal karena tertutup lapak atau kursi pedagang. Bahkan sudah ada yang rusak”.

Merujuk pada kajian hasil penelitian dengan tema yang sama, 1) (Winarni, dkk., 2013) mengatakan bahwa kawasan Malioboro dalam penyediaan fasilitas publik belum optimal dan terjadinya alih fungsi pedestrian area (*guiding block*) bagi tunanetra. 2) (Kezia, 2018) mengemukakan bahwa kualitas fasilitas umum pada jalur pedestrian Malioboro belum ramah difabel karena terdapat kualitas pemasangan *guiding block* yang belum memenuhi standar pemasangan. Berdasarkan beberapa uraian tersebut, maka dapat diketahui bahwa terdapat beberapa permasalahan terkait jalur *guiding block* yang ada di jalur pedestrian Malioboro.

Berdasarkan data jumlah difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami kenaikan dari tahun 2016 hingga 2017 namun, terjadi penurunan di tahun 2018 hingga tahun 2019.

Tabel 1. 1

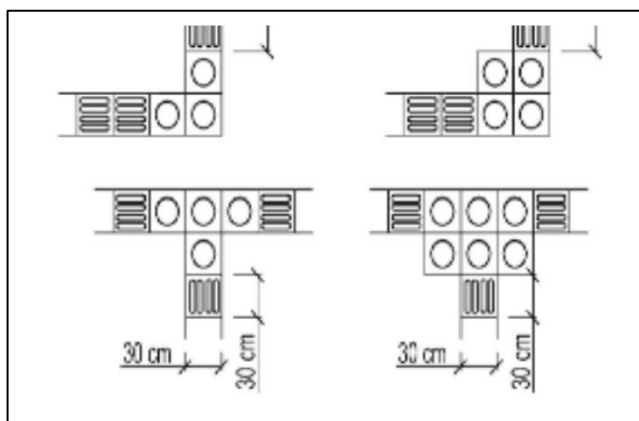
Data Difabel Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016-2021

2016	2017	2018	2019	2020	2021
26.177	29.530	29.025	27.129	-	26.314

Sumber: Bappeda DIY, 2021

Hal ini sebaiknya menjadi gambaran bagi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyediaan fasilitas umum berstandar terutama dalam hal aksesibilitas bagi difabel.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum telah mengatur aksesibilitas tentang *guiding block*. Mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 terdapat acuan skema pemasangan ubin pengarah dan ubin peringatan yang sesuai standar internasional.



Gambar 1. 1 Skema Pemasangan *Guiding Block*  
Sumber: Menteri Pekerjaan Umum, 2006

Meskipun peraturan sudah ditetapkan, akan tetapi pengetahuan akan fungsi dari *guiding block* belum dikenal masyarakat luas. Terbukti para pejalan kaki yang bukan penyandang tunanetra masih melewati jalur tersebut. Selain itu, bentuk ubin yang ada di lapangan masih belum sesuai dengan persyaratan teknis pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006. Kondisi ini dapat lebih parah seiring dengan banyaknya kemungkinan kerusakan atau berkurangnya nilai fungsi dari adanya *guiding block* khususnya di area pedestrian Malioboro, para penyandang tunanetra bisa saja tersandung, tergelincir, atau tertabrak tiang. Dengan berbagai permasalahan ini mengakibatkan para penyandang tunanetra merasa tersingkirkan dan tidak merasakan adanya manfaat dari *guiding block*.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka penelitian ini tidak hanya berfokus pada penilaian aksesibilitas dan analisis kondisi *guiding block* di jalur pedestrian Malioboro, melainkan menghasilkan suatu produk pemetaan yang memberikan informasi spasial mengenai lokasi sasaran perbaikan *guiding*

*block* di jalur pedestrian Malioboro. Mengingat pentingnya persamaan hak setiap manusia khususnya dalam pemanfaatan fasilitas umum bagi penyandang tunanetra, maka revitalisasi jalur *guiding block* sangat diperlukan di area pedestrian Malioboro. Oleh karena itu, perlu adanya perencanaan yang matang dalam menentukan lokasi-lokasi perbaikan *guiding block*.

Dalam pembuatan produk pemetaan ini menggunakan metode survei lapangan untuk mengetahui, mengidentifikasi, dan menganalisis kondisi nyata *guiding block* di jalur pedestrian Malioboro. Selain itu, peneliti juga menyertakan partisipasi aktif dari penyandang tunanetra di Yogyakarta melalui wawancara untuk memperoleh berbagai informasi mengenai aksesibilitas, manfaat, dan masukan untuk perbaikan jalur *guiding block* yang ada di pedestrian Malioboro.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dilakukan penelitian yang berjudul “Analisis Kondisi *Guiding Block* Berdasarkan Hasil Pemetaan Pada Jalur Pedestrian Malioboro Kota Yogyakarta”. Hasil dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi pemanfaatan data geospasial yang dikombinasikan dengan partisipasi penyandang tunanetra untuk perencanaan revitalisasi jalur *guiding block* di area pedestrian Malioboro sehingga setiap masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas umum yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta guna terpenuhinya hak seluruh masyarakat khususnya kaum tunanetra.

## 1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana penilaian aksesibilitas ketika melintasi jalur *guiding block* di jalur pedestrian Malioboro dari sudut pandang kaum tunanetra?
2. Apakah kondisi faktual jalur *guiding block* di jalur pedestrian Malioboro sudah memenuhi persyaratan teknis pemasangan ubin sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006?

3. Bagaimana kondisi *guiding block* berdasarkan hasil pemetaan pada jalur pedestrian Malioboro sebagai pertimbangan dalam rencana revitalisasi sesuai dengan persyaratan teknis pemasangan ubin menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Mengkaji dan menganalisis penilaian aksesibilitas ketika melintasi *guiding block* di jalur pedestrian Malioboro dari sudut pandang kaum tunanetra;
2. Menganalisis dan menyandingkan kondisi faktual *guiding block* di jalur pedestrian Malioboro dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006; dan
3. Mengkaji dan menganalisis kondisi *guiding block* berdasarkan hasil pemetaan pada jalur pedestrian Malioboro sebagai pertimbangan dalam rencana revitalisasi sesuai dengan persyaratan teknis Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006.

### 1.4 Manfaat/Signifikansi Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat teoretis:
  - a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi untuk melengkapi teori yang sudah ada pada penelitian serupa sebelumnya;
  - b. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain yang akan mengangkat tema yang sama namun dengan sudut pandang dan wilayah kajian yang berbeda; dan
  - c. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan informasi geospasial terutama mengenai pengaplikasian dari adanya metode survei pemetaan wilayah.
2. Manfaat praktis:

Adapun manfaat praktis yang ingin dicapai pada penelitian ini sebagai berikut.

- a. Bagi instansi, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal penyediaan fasilitas umum;
- b. Bagi universitas, diharapkan dapat menjadi sumber literatur tambahan bagi perpustakaan dan koleksi bacaan terkait survei pemetaan wilayah dan pemetaan fasilitas umum;
- c. Bagi masyarakat, diharapkan dapat menjadi edukasi terkait kondisi dan manfaat dari adanya fasilitas umum; dan
- d. Bagi penulis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai salah satu cara untuk mengamalkan ilmu ketika kuliah, menjadi pengalaman melakukan penelitian serta pengalaman dalam menulis suatu karya ilmiah.

### **1.5 Definisi Operasional**

Definisi operasional ditujukan untuk memahami dan menghindari terjadinya kesalahan dalam penafsiran kata, maka akan dipaparkan mengenai pengertian umum dari kata kunci yang terdapat dalam penelitian sebagai berikut.

#### **1. Pemetaan**

Pemetaan didefinisikan sebagai proses kegiatan untuk menghasilkan peta, meliputi tahapan akuisisi data baik dengan survei terestris, survei fotogrametri, penginderaan jauh atau survei GPS yang kemudian dilakukan dengan pengolahan dan manipulasi data yang ditujukan untuk menghasilkan perepresentasian data serta informasi dalam bentuk peta analog maupun peta digital (Abidin, 2007).

#### **2. Pemetaan Partisipatif**

Pemetaan Partisipatif adalah proses pengambilan data dan informasi di lapangan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan perangkat pemerintahan sebagai perencana dan pemberi

informasi (Hidayat, 2005; Prayitno, 2012; Pande, 2014 dalam Purwanti, 2015).

### 3. Rencana

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

### 4. Revitalisasi

Mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 18 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan, revitalisasi adalah upaya meningkatkan nilai lahan/kawasan melalui pengembangan kembali dalam suatu kawasan yang dapat meningkatkan fungsi kawasan sebelumnya.

### 5. Jalur *Guiding Block*

Jalur *guiding block* adalah jalur khusus yang didesain untuk difabel pada trotoar. Ubin ini terdiri atas dua jenis yakni ubin pengarah dan ubin peringatan. Ubin pengarah adalah ubin yang memiliki tekstur garis-garis, berfungsi sebagai penanda jalur atau rute suatu jalan. Sedangkan ubin peringatan adalah ubin dengan tekstur bulat-bulat yang menandakan adanya persimpangan jalan atau penanda ke daerah yang berbahaya atau berisiko (Mitani & Aoki, 2012).

### 6. Jalur Pedestrian

Jalur pedestrian didefinisikan sebagai jalur yang merupakan sarana infrastruktur fisik berupa jalan/jalur yang diperuntukan bagi aktifitas berjalan seorang manusia/pejalan kaki (Sakinah, dkk., 2018).

### 7. Aksesibilitas

Definisi aksesibilitas pada penelitian ini mengacu pada definisi yang dipaparkan oleh Sholahuddin (dalam Yudhanta,



2018) yang menerangkan bahwa aksesibilitas merupakan kemudahan bergerak melalui dan menggunakan lingkungan yang berkaitan dengan sirkulasi dan visual.

#### 8. Tunanetra

Tunanetra adalah istilah yang umum digunakan untuk menunjukkan keadaan individu yang mengalami kelainan atau gangguan fungsi indra penglihatan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdullah (dalam Rahimi, dkk., 2019) bahwa tunanetra tidak hanya mereka yang buta, tetapi mencakup juga mereka yang termasuk “setengah melihat”, “*low vision*”, atau rabun.

#### 9. Malioboro

Malioboro atau dalam Bahasa sanskerta “Malyabara” yang memiliki arti berhiaskan karangan bunga merupakan nama salah satu kawasan jalan dari tiga jalan di Kota Yogyakarta yakni Jalan Margo Utomo, Jalan Malioboro dan Jalan Margo Mulyo yang membentang dari Tugu Yogyakarta hingga ke perempatan Kantor Pos Indonesia Yogyakarta. Jalan Malioboro merupakan poros imajiner Kraton Yogyakarta.

### 1.6 Struktur Organisasi Skripsi

Struktur organisasi dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yaitu.

**Bab I Pendahuluan.** Pada bagian ini merupakan bagian pembuka dari penyusunan skripsi. Penulis memaparkan latar belakang permasalahan dan dampaknya pada objek penelitian yang mendasari pengambilan topik pemetaan rencana revitalisasi *guiding block* di jalur pedestrian Malioboro. Pada latar belakang masalah dibatasi dengan rumusan masalah untuk memfokuskan kajian agar penelitian lebih terarah. Pada bab ini juga di paparkan tujuan penelitian yang hendak dicapai sekaligus manfaat/signifikansi penelitian yang didasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah.

**Bab II Tinjauan Pustaka.** Pada bab ini berisi tentang penjelasan mengenai kajian pustaka yang dapat mendukung pembahasan masalah. Tinjauan pustaka diambil dari sumber-sumber yang relevan agar dapat menguatkan urgensi dari penelitian. Kajian pustaka meliputi dasar teori pendukung pokok permasalahan di antaranya teori mengenai peta, pemetaan, pemetaan partisipatif, rencana, revitalisasi, jalur *guiding block*, jalur pedestrian, aksesibilitas, difabel, tunanetra dan peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 30/PRT/M/2006.

**Bab III Metode Penelitian.** Pada bab ini berisi tentang informasi metode penelitian, lokasi dan waktu penelitian, alat dan data yang digunakan, langkah penelitian, dan tahapan/alur penelitian. Tahapan penelitian yang dilakukan terbagi menjadi tahapan perolehan data dan tahapan pengolahan data. Pada tahapan perolehan data terdiri dari studi literatur, survei lapangan untuk melihat, mengidentifikasi dan menganalisis kondisi nyata ubin disandingkan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 30/PRT/M/2006 serta wawancara kepada subjek penelitian yakni masyarakat tunanetra di Yogyakarta. Pada tahapan pengolahan data terdiri dari pengolahan data dan tabulasi data lapangan menggunakan *software* Excel, pengolahan data lapangan menggunakan *software* AutoCAD Civil 3D Land Companion, pengolahan data lapangan menggunakan *software* ArcGIS, dan pengolahan data lapangan menggunakan *software* Corel Draw X3.

**BAB IV Hasil dan Pembahasan.** Pada bab ini, penulis akan memaparkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dengan dilengkapi teori-teori serta data yang ditemukan di lapangan terkait penilaian aksesibilitas penggunaan *guiding block* melalui wawancara kepada para tunanetra di Yogyakarta, identifikasi kondisi ubin di pedestrian Malioboro, dan analisis kondisi ubin untuk bahan pertimbangan dalam rencana revitalisasi *guiding block* di pedestrian Malioboro. Penulis juga menjawab serta membahas rumusan masalah yang telah diajukan sebelumnya dan telah ditemukan jawabannya ketika penelitian berlangsung.

**BAB V Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi.** Pada bab ini, penulis akan memaparkan simpulan, implikasi dan rekomendasi dari latar belakang, rumusan masalah serta hasil dan pembahasan penelitian yang telah dikaji.

### 1.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian dengan judul “Analisis Kondisi *Guiding Block* Berdasarkan Hasil Pemetaan Pada Jalur Pedestrian Malioboro Kota Yogyakarta” mengacu pada beberapa penelitian terdahulu dengan tema yang sama, akan tetapi pada penelitian ini terdapat perbedaan pada objek, parameter dan lokasi penelitian. Penelitian ini merujuk pada tiga belas penelitian terdahulu, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut.

Tabel 1. 2  
Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Tahun	Judul	Masalah	Tujuan	Metode	Hasil
1.	F. Winarni, dkk., 2013	Revitalisasi kawasan Malioboro Kota Yogyakarta Dalam Penyediaan Fasilitas Publik Untuk Mewujudkan Pelayanan Inklusif (Studi Kasus Alih Fungsi Pedestrian Area <i>Guiding Block</i> Bagi Tunanetra di Kawasan Malioboro	1. Bagaimana revitalisasi kawasan Malioboro dalam penyediaan fasilitas pelayanan publik untuk mewujudkan pelayanan inklusif? 2. Mengapa terjadi alih fungsi pedestrian area ( <i>guiding block</i> ) bagi tunanetra di kawasan Malioboro	1. Mengetahui kemampuan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam merevitalisasi kawasan Malioboro dalam penyediaan fasilitas pelayanan publik untuk mewujudkan pelayanan inklusif bagi kelompok rentan/minoritas/difabilitas 2. Menguraikan akar	Studi deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus.	Revitalisasi kawasan Malioboro dalam penyediaan fasilitas publik belum optimal dan terjadinya alih fungsi pedestrian area ( <i>guiding block</i> ) bagi tunanetra.

		Kota Yogyakarta)	Kota Yogyakarta dapat terjadi? 3. Bagaimana upaya pemerintah Kota Yogyakarta dalam merevitalisasi fungsi pedestrian area ( <i>guiding block</i> ) bagi tunanetra di kawasan Malioboro Kota Yogyakarta?	penyebab alih fungsi pedestrian area ( <i>guiding block</i> ) bagi tunanetra di kawasan Malioboro Kota Yogyakarta dapat terjadi 3. Mengetahui upaya pemerintah Kota Yogyakarta dalam merevitalisasi fungsi pedestrian area ( <i>guiding block</i> ) bagi tunanetra di kawasan Malioboro Kota Yogyakarta		
2.	Nadhyanmas Ilham Satrio Pamungkas, 2019	Evaluasi Pemasangan <i>Guiding Block</i> Atau Jalur Khusus Penyandang Difabel Pada Trotoar Di Kota Magelang	1. Bagaimana evaluasi pemasangan ubin pemandu untuk jalur penyandang difabel pada trotoar atau yang disebut <i>guiding</i>	1. Mengevaluasi dalam pemasangan <i>guiding block</i> atau jalur untuk penyandang disabilitas di beberapa ruas jalan Kota Magelang sesuai dengan	Teknik triangulasi dan metode <i>ex pose facto</i>	Layanan transportasi public berdasarkan indikator penelitian adalah sarana pelayanan transportasi publik belum memenuhi persyaratan aksesibilitas. Sedangkan

			<i>block?</i>	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan.		layanan transportasi publik menurut kaum difabel dan tunanetra belum ramah terhadap difabel dan belum sesuai dengan harapan. Maka kaum difabel dan tunanetra tidak puas terhadap kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah. Sehingga diperlukan langkah-langkah untuk mengembangkan dan perawatan layanan publik ramah difabel agar dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi mereka.
3.	Hidekatsu Aoki & Seiji Mitani, 2012	<i>Tactile Walking Surface Indicators (Making Streets Safer for Visually Impaired)</i>	1. Apakah ISO 23599:2012 <i>Assistive product for blind and vision-impaired persons-</i>	1. Mengidentifikasi dan menganalisis pengaplikasian ISO 23599:2012 <i>Assistive product for blind and</i>	Survei lapangan dan uji komparasi	ISO 23599 mencakup standar teknis untuk permukaan TWSI dan prinsip pemasangan. Standar teknis mencakup bentuk, dimensi,

		<i>Pedestrians)</i>	<i>tactile walking surface indicators</i> dapat berkontribusi dalam mewujudkan kualitas dan konsistensi penggunaan <i>Tactile Walking Surface Indicators</i> (TWSI)?	<i>vision-impaired persons-tactile walking surface indicators</i>		pengaturan, dan jarak elemen tekstur untuk TWSI yang telah ditunjukkan untuk meningkatkan deteksi dan identifikasi yang akurat baik menggunakan kaki maupun dengan menggunakan tongkat ( <i>white cane</i> ). Selain itu juga meliputi standar teknis untuk kontras <i>luminance</i> , memastikan bahwa TWSI akan terlihat maksimal oleh orang-orang dengan <i>low vision</i> .  ISO 23599 akan memungkinkan perjalanan yang aman dan terjamin bagi orang-orang dengan gangguan penglihatan di seluruh dunia. Di era digital
--	--	---------------------	---	---	--	--

						ini memungkinkan untuk adanya kemudahan bagi para tunanetra untuk memanfaatkan <i>platform</i> berbasis GPS untuk mencari informasi jalan yang aman dan waktu tempuh.
4.	Riesta Sakinah, Hanson E.Kusuma, Angela C. Tampubolon & Bakri Prakarso, 2018	Kriteria Jalur Pedestrian di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana faktor yang mempengaruhi orang berjalan kaki pada jalur khusus pedestrian?</li> <li>2. Bagaimana keterkaitan antara elemen perkotaan dan perencanaan pedestrian kota sehingga jalur pedestrian dapat memenuhi berbagai</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menganalisis faktor yang mempengaruhi orang berjalan kaki pada jalur khusus pedestrian</li> <li>2. Menganalisis keterkaitan antara elemen perkotaan dan perencanaan pedestrian kota sehingga jalur pedestrian dapat memenuhi berbagai kebutuhan pengguna</li> </ol>	<i>Grounded theory</i> , survei lapangan dan pembagian kuisisioner secara <i>online</i> .	Terdapat tiga keterkaitan antara jarak berjalan kaki dengan rekreatif, fungsional dan pragmatis (mengutamakan segi kepraktisan dan kegunaan).



			kebutuhan pengguna?			
5.	Tennøy, A., Øksenholt, KV., Fearnley, N. og Matthews, B., 2015	<i>Assessing Standards for Usable and Safe Environments for Sight Impaired</i>	<p>1. Bagaimana kualitas standar dan pedoman berkontribusi pada proses perencanaan dan desain untuk mewujudkan lingkungan yang aman bagi tunanetra?</p> <p>2. Mengapa kualitas standar dan pedoman berkontribusi pada proses perencanaan dan desain untuk mewujudkan lingkungan yang aman bagi tunanetra?</p>	<p>1. Menganalisis dan mengkaji kualitas standar dan pedoman berkontribusi pada proses perencanaan dan desain untuk mewujudkan lingkungan yang aman bagi tunanetra</p> <p>2. Menganalisis dan mengkaji kualitas standar dan pedoman berkontribusi pada proses perencanaan dan desain untuk mewujudkan lingkungan yang aman bagi tunanetra</p>	Survei lapangan, <i>Forum Group Discussion</i> (FGD), Wawancara, dan Studi Kasus.	<p>Dalam merevisi standar dan pedoman nasional yang memfasilitasi penyandang tunanetra dalam sistem transportasi, otoritas Norwegia memerlukan penilaian standar dan praktik penggunaan <i>guiding block</i>. Dua permasalahan inti yakni mengenai desain ubin dan lokasi pemberhentian angkutan umum. <i>Guiding block</i> sebaiknya diletakan pada lokasi yang benar dan dapat dipastikan kemudahan aksesibilitas dan keamanan bagi tunanetra. Bukti di lapangan menunjukkan</p>

						kurangnya konsistensi dan peletakan ubin yang benar menyebabkan potensi bahaya bagi tunanetra.
6.	Fairuzzana Ahmad Padzi & Fuziah Ibrahim, 2012	<i>Accessibility of Visually Impaired Passengers at Urban Railway Stations in The Klang Valey</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana evaluasi tingkat aksesibilitas penggunaan fasilitas ramah difabel pada LRT Kelana Jaya <i>Line</i>?</li> <li>2. Bagaimana evaluasi kesesuaian desain dan struktur bangunan ramah difabel pada LRT Kelana Jaya <i>Line</i> berdasarkan aturan pada <i>Malaysia Standards Code of Practice for Access</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menganalisis dan mengevaluasi aksesibilitas bagi kaum difabel terutama yang memiliki gangguan penglihatan (tunanetra) pada LRT Kelana Jaya <i>Line</i></li> <li>2. Mengevaluasi kesesuaian standar desain dan struktur bangunan yang ramah difabel pada stasiun LRT Kelana Jaya <i>Line</i> berdasarkan aturan pada <i>Malaysia Standards Code of Practice for</i></li> </ol>	Survei lapangan berupa observasi langsung dan wawancara narasumber dengan pendekatan kualitatif	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sudah terdapat fasilitas dan akomodasi yang ditujukan untuk kaum difabel, akan tetapi desain dan struktur fasilitas yang ada belum sepenuhnya memenuhi standar penggunaan sesuai dengan aturan <i>Malaysia Standards Code of Practice for Access of Disabled People to Public Buildings</i> (MS1184:2002). Oleh karena itu, pentingnya keterlibatan kaum difabel dalam

			<i>of Disabled People to Public Buildings</i> (MS1184:2002)?	<i>Access of Disabled People to Public Buildings</i> (MS1184:2002)		perencanaan pembangunan.
7.	Ali Rahmat, 2022	<i>Creating Good Environment and Building for People with Special Needs: From Definition to Application of Guiding and Warning Blocks</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana definisi <i>guiding block</i>?</li> <li>2. Bagaimana pengaplikasian dan pengimplementasian penggunaan <i>guiding block</i> untuk mewujudkan struktur lingkungan dan bangunan yang baik untuk difabel?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menganalisis dan mengkaji definisi <i>guiding block</i></li> <li>2. Mneidentifikasi pengaplikasian dan pengimplementasian penggunaan <i>guiding block</i> bagi difabel</li> </ol>	Studi analisis literatur	Inti dari adanya <i>guiding block</i> adalah untuk membuat dan memberikan jalur khusus bagi penyandang disabilitas untuk berjalan secara mandiri di tempat umum. Para penyandang disabilitas dapat memanfaatkan tekstur yang ada pada setiap ubin <i>guiding block</i> . Adapun pola tekstur yang ada pada setiap ubin terbagi menjadi dua yakni ubin yang berpola lingkaran kecil (mengindikasikan peringatan) dan berpola garis lurus (mengindikasikan aman

						untuk dilalui).
8.	Rischa Oktari Sari & Diah Intan Kusumo Dewi, 2015	Pemanfaatan Jalur Pemandu Tunanetra Pada Pedestrian di Kota Semarang	1. Apa yang menyebabkan tunanetra sangat jarang memanfaatkan jalur pemandu pada pedestrian di Kota Semarang?	1. Mengetahui penyebab tunanetra sangat jarang memanfaatkan jalur pemandu pada pedestrian di Kota Semarang.	Pendekatan kuantitatif deskriptif dengan teknik analisis distribusi frekuensi.	Jalur pemandu di Kota Semarang jarang dimanfaatkan oleh tunanetra karena hampir seluruh tunanetra tidak tahu adanya jalur itu karena tidak ada sosialisasi dari pemerintah terkait jalur pemandu.
9.	Esnandiar Khoirunnisa & Dwi Aries Himawanto, 2018	Perbandingan Ketersediaan Ubin Bertekstur Pemandu Untuk Tunanetra di Tempat Umum Antara Kota Surakarta dan Kota Nagoya	1. Bagaimana kondisi ubin tekstur pemandu yang ada di Kota Surakarta dan yang ada di Kota Nagoya? 2. Apakah kondisi ubin bertekstur sudah memenuhi standar pemasangan?	1. Membandingkan keberadaan ubin tekstur pemandu yang ada di Surakarta dengan yang ada di Kota Nagoya 2. Mengetahui apakah pemasangan ubin tekstur pemandu di Surakarta dapat menjadi fasilitas aksesibilitas yang ideal bagi tunanetra	Studi komparasi dengan teknik pengumpulan data observasi.	Ubin tekstur pemandu sangat biasa dijumpai di Kota Nagoya sedangkan di Kota Surakarta banyak tempat umum yang belum dilengkapi ubin tekstur pemandu selain itu jumlah ubin tekstur pemandu masih kurang memenuhi kelayakan aksesibilitas bagi tunanetra.

10.	Sugi Rahayu; Utami Dewi & Marita Ahdiyana, 2013	Pelayanan Publik Bidang Transportasi bagi Difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana penyediaan layanan publik transportasi bagi kaum difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta?</li> <li>2. Solusi apa yang tepat untuk diterapkan dalam pemberian pelayanan transportasi yang adil dan pro difabel?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menganalisis penyediaan pelayanan publik khususnya dibidang transportasi bagi kaum difabel</li> <li>2. Mengidentifikasi alternatif solusi yang dapat diterapkan dalam pemberian pelayanan bidang transportasi yang adil dan pro difabel</li> </ol>	Penelitian kualitatif dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.	Penyediaan layanan perhubungan untuk memenuhi kebutuhan kaum difabel belum optimal.
11.	Adrian Sembor; Pingkan P. Egam & Judy O. Waani, 2016	Evaluasi Jalur Pedestrian Bagi Tunanetra Terhadap Persyaratan Teknis di Koridor Jalan Sam Ratulangi Kota Manado	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana kriteria perancangan jalur pedestrian bagi tunanetra di koridor Jalan Sam Ratulangi Kota Manado?</li> <li>2. Apakah kondisi jalur pedestrian bagi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menentukan kriteria perancangan jalur pedestrian bagi tunanetra di koridor Jalan Sam Ratulangi Kota Manado</li> <li>2. Melakukan evaluasi jalur pedestrian bagi tunanetra terhadap persyaratan</li> </ol>	Metodologi kuantitatif rasionalistik dengan pendekatan metode deduktif.	Kondisi jalur pedestrian bagi tunanetra terhadap persyaratan teknis di koridor Jalan Sam Ratulangi Kota Manado dari kriteria keselamatan belum sepenuhnya menjamin keselamatan bagi pengguna

			tunanetra di koridor Jalan Sam Ratulangi Kota Manado sudah memenuhi persyaratan teknis?	teknis		terutama bagi tunanetra. Dari aspek kemudahan juga belum terpenuhi, terdapat beberapa elemen trotoar yang tidak sesuai persyaratan teknis.
12.	Ezza Oktavia Utami; Santoso Tri Raharjo & Nurliana Cipta Apsari, 2018	Aksesibilitas Penyandang Tunadaksa	1. Bagaimana pelaksanaan penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang telah di terapkan di Institut Teknologi Bandung	1. Menganalisis penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang telah diterapkan di Institut Teknologi Bandung	Metode observasi dan studi literatur	Aksesibilitas bangunan institusi masih belum mencapai sempurna sesuai dengan standar untuk dapat diakses oleh penyandang tunadaksa sehingga belum memenuhi asas aksesibilitas, keselamatan, kemudahan, kegunaan dan kemandirian.
13.	Kezia Aprilia, 2018	Evaluasi Pemasangan <i>Guiding Block</i> Jalur Khusus Penyandang Difabel Pada Trotoar di Beberapa Ruas Jalan	1. Mengevaluasi ubin pemandu untuk jalur penyandang difabel pada trotoar atau disebut <i>guiding blocks</i>	1. Mengevaluasi pemasangan dan penempatan <i>guiding blocks</i> di beberapa ruas jalan di Yogyakarta sesuai standart dan syarat	Teknik triangulasi dengan pendekatan servqual dan <i>expose facto</i>	Kualitas layanan transportasi pada layanan khusus pada jalur pedestrian berdasarkan indikator yaitu belum ramah terhadap difabel karena kualitas pemasangannya

		Kota Yogyakarta		Peraturan Menteri No 30 Tahun 2006 2. Mengevaluasi kepuasan, kenyamanan dan keamanan pengguna <i>guiding blocks</i>		belum memenuhi standar.
--	--	-----------------	--	--	--	-------------------------

Sumber: Analisis Penulis (2021)

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas, ditemukan bahwa terdapat masalah aksesibilitas pelayanan publik untuk kaum difabel terlebih di kota-kota besar. Sebagai contoh, yakni penelitian yang dilakukan oleh Esnandiar Khoirunnisa dan Dwi Aries Himawanto dengan judul “Perbandingan Ketersediaan Ubin Bertekstur Pemandu Untuk Tunanetra di Tempat Umum Antara Kota Surakarta dan Kota Nagoya” yang meneliti perbedaan kondisi ubin tekstur pemandu untuk tunanetra yang ada di Kota Surakarta dan Kota Nagoya dengan metode studi komparasi dengan teknik pengumpulan data observasi. Dari penelitian ini ternyata di Kota Nagoya ubin tekstur sudah banyak ditemukan dan sudah dimanfaatkan sesuai fungsinya, hal ini jelas berbeda dengan kondisi di Kota Surakarta yang jumlah ubin tekstur masih sedikit dan fungsinya masih di salah gunakan.

Terdapat pula penelitian yang dilakukan oleh Adrian Sembor, Pingkan P. Egam & Judy O. Waani dengan judul “Evaluasi Jalur Pedestrian Bagi Tunanetra Terhadap Persyaratan Teknis di Koridor Jalan Sam Ratulangi Kota Manado” yang menghasilkan informasi bahwa kondisi jalur pedestrian bagi tunanetra terhadap persyaratan teknis di koridor Jalan Sam Ratulangi Kota Manado dari kriteria keselamatan belum sepenuhnya menjamin keselamatan bagi pengguna terutama bagi tunanetra. Dari aspek kemudahan juga belum terpenuhi, terdapat beberapa elemen trotoar yang tidak sesuai persyaratan teknis.

Selain itu, penelitian mengenai aksesibilitas penggunaan guiding block juga dilakukan oleh Kezia Aprilia dengan judul “Evaluasi Pemasangan *Guiding Block* Jalur Khusus Penyandang Difabel Pada Trotoar di Beberapa Ruas Jalan Kota Yogyakarta”. Pada penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa Kualitas layanan transportasi pada layanan khusus pada jalur pedestrian berdasarkan indikator yaitu belum ramah terhadap difabel karena kualitas pemasangannya belum memenuhi standar.

Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut dapat diketahui bahwa kondisi jalur *guiding blocks* di Indonesia masih belum dimanfaatkan secara optimal dan juga jumlahnya masih sedikit. Oleh karena itu pada penelitian ini akan berfokus pada rencana revitalisasi jalur *guiding blocks* khususnya di area



pedestrian Malioboro menggunakan metode yang berbeda yakni dengan mengaplikasikan metode survei pemetaan wilayah dan studi kasus serta observasi ke lapangan untuk membandingkan kondisi faktual *guiding block* pada jalur pedestrian Malioboro dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 yang mengatur mengenai standar pemasangan dan desain *guiding block*. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara kepada masyarakat tunanetra di Yogyakarta untuk mendapatkan informasi mengenai aksesibilitas penggunaan *guiding block* di pedestrian Malioboro.